

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR WELERI MAKMUR
TAHUN 2021**



JL. MAJAPAHIT, RUKO GAYAMSARI NO. 17-20 SEMARANG

TELP. 024 6733325, FAX. 024 6723588

www.bprwm.co.id

KATA PENGANTAR

PT BPR Weleri Makmur, selanjutnya cukup disebut BPR WM selalu berupaya menyempurnakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan pada seluruh tingkatan organisasi. Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan komponen penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat.

BPR WM telah beroperasi lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap aktivitas operasional akan semakin meneguhkan komitmen untuk mewujudkan BPR WM menjadi BPR terbaik yang berperan penting dalam mengembangkan perekonomian Jawa Tengah, dengan senantiasa:

1. Memahami berbagai kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat;
2. Membangun sumber daya manusia yang profesional dan memiliki integritas tinggi;
3. Menumbuhkembangkan dan menjaga kepercayaan semua *stakeholders* melalui kebijakan yang *prudent*, transparan dan komunikasi yang terbuka; dan
4. Mengembangkan, menyempurnakan, dan mensinergikan segala bidang terkait untuk mencapai nilai tambah yang optimal dan hasil yang terbaik.

Dalam menerapkan Tata Kelola yang baik, BPR WM selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek penerapan Tata Kelola yang baik, meliputi: Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil Penerapan Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi instisari sekaligus fokus BPR WM dalam mewujudkan Tata Kelola yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

BAB I

PENDAHULUAN

BPR WM memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan Tata Kelola sesuai standar yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar BPR WM dapat terus tumbuh berkelanjutan secara wajar menjadi BPR terbaik yang berperan penting dalam mengembangkan perekonomian Jawa Tengah.

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, BPR WM senantiasa memerhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking principle*). Hal tersebut sudah menjadi kebutuhan BPR WM untuk selalu patuh pada peraturan perundang-undangan, memerhatikan nilai-nilai etika yang berlaku umum dan melaksanakan kegiatan usaha yang berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam menerapkan Tata Kelola, BPR WM berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola, meliputi:

- a. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat;
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; dan
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola pada BPR WM bertujuan, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja. Penerapan Tata Kelola dalam segala aktivitas sejalan dengan visi, misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

2. Menjaga kegiatan operasional agar selalu patuh pada setiap ketentuan intern maupun ekstern serta ketentuan perundang-undangan.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Memperkuat budaya organisasi.
5. Mengelola sumber daya secara efektif dan efisien.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola yang dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Kerry Thamrim
	Jabatan : Direktur Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR WM. 2. Mengelola BPR WM sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Merealisasikan pencapaian semua target-target perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis. 5. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. 7. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan. 8. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional. 9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai peraturan perundang-undangan. 10. Mengungkapkan kebijakan strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 11. Menyediakan data/informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh kepada Dekom. 12. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<p>13. Memutuskan setiap kebijakan strategis melalui rapat Direksi dengan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat.</p> <p>14. Mengungkapkan kepemilikan saham di BPR WM dan perusahaan lain serta mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham dalam rangka memenuhi aspek transparansi Direksi.</p> <p>15. Tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM.</p> <p>16. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR WM, selain yang telah ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>17. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima dalam Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM.</p>
2.	<p>Nama : Hendrardi</p> <p>Jabatan : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPR WM telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR WM tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR WM terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada OJK dan otoritas lain. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Melaporkan kepada Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi. Mencegah Direksi untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<p>menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain.</p> <p>9. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.</p>
3.	<p>Nama : Kasmiasi</p>
	<p>Jabatan : Direktur Operasional</p>
	<p>Tugas dan tanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional BPR WM. 2. Menerapkan Tata Kelola pada setiap aktivitas operasional BPR WM. 3. Merealisasikan pencapaian target operasional BPR WM. 4. Menumbuhkan dan mewujudkan budaya kepatuhan pada kegiatan operasional; 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas operasional kepada Direktur Utama; 8. Menyediakan data/informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris; 9. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi; 10. Mengungkapkan kepemilikan saham di BPR WM dan perusahaan lain serta mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham dalam rangka memenuhi aspek transparansi Direksi; 11. Tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM; 12. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR WM, selain yang telah ditetapkan oleh RUPS; 13. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima dalam Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM.

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:		
	Rekomendasi Dewan Komisaris	Tindak Lanjut Direksi
<p>Triwulan I 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu kebijakan percepatan penyelesaian kredit bermasalah, kredit hapus buku dan AYDA. 2. Kebijakan restrukturisasi kredit dampak pandemi Covid-19 agar memerhatikan kriteria dan penilaian kelayakan restrukturisasi. 3. Perlu upaya meningkatkan KYD yang sehat untuk menunjang pertumbuhan bisnis. 4. Perlu inovasi program dalam rangka menjaga kestabilan pertumbuhan kredit. 	<p>Triwulan I 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian kredit NPL, PH dan AYDA diupayakan secara intensif melalui meeting monitoring penyelesaian kredit bermasalah setiap bulan. Kebijakan penyelesaian kredit bermasalah dengan penghapusan denda dan sebagian bunga tetap dilanjutkan dan terbukti cukup efektif. 2. Penilaian kelayakan debitur restrukturisasi kredit karena Covid-19 dilakukan lebih intens dan menyeluruh berbasis manajemen risiko. 3. Upaya meningkatkan KYD yang sehat dengan Promo Extra Kredit69 berbunga 0,69% pm flat, jangka waktu sampai 3 tahun, plafon maksimal Rp2 miliar per debitur. 4. Rencana akan dibuat kompetisi penyaluran Kredit Extra69 dalam rangka meningkatkan motivasi dan keagresifan pemasar dalam peningkatan porto folio kredit secara keseluruhan. 	

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
	Rekomendasi Dewan Komisaris	Tindak Lanjut Direksi
	<p>Triwulan II 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan KYD yang sehat agar menjadi salah satu fokus perhatian Direksi. Perlu pendekatan melalui cara-cara baru yang lebih inovatif dan kreatif termasuk usaha meningkatkan kinerja AO agar lebih signifikan dalam menunjang pertumbuhan KYD yang sehat. 2. Penyelesaian kredit NPL, hapus buku dan AYDA juga agar menjadi fokus perhatian bagi Direksi, perlu langkah kongkrit dalam upaya percepatan penyelesaian kredit bermasalah. 3. Dalam rangka meningkatkan aset dan penyediaan dana berbunga murah, perlu meningkatkan komposisi Tabungan terhadap total penghimpunan dana pihak ketiga. 	<p>Triwulan II 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan KYD yang sehat diupayakan melalui program kompetisi GPX69. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja <i>Account Officer</i> (AO) dengan tujuan agar hasil kerja AO efektif dan signifikan dalam menunjang pertumbuhan KYD yang sehat. 2. Penyelesaian kredit NPL, PH dan AYDA diupayakan secara intensif dan maksimal melalui serangkaian meeting monitoring penyelesaian kredit bermasalah setiap bulan untuk masing-masing Kantor Cabang agar pembahasan lebih optimal. Kebijakan penyelesaian kredit bermasalah dengan penghapusan denda dan sebagian bunga tetap dilanjutkan. 3. Pencapaian target Tabungan Tamasha seperti Sraya 3 dan Kudus VII akan diupayakan untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga khususnya produk Tabungan, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan aset BPR WM.

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
	Rekomendasi Dewan Komisaris	Tindak Lanjut Direksi
	<p>Triwulan III 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu usaha meningkatkan pertumbuhan kredit yang sehat, termasuk monitoring dan evaluasi kinerja AO tentang peningkatan konsistensi hasil kerja. 2. Perlu kebijakan percepatan penyelesaian kredit bermasalah, hapus buku dan AYDA. 3. Perlu strategi dan kebijakan untuk memupuk aset menjelang akhir tahun, dengan mengembangkan penghimpunan dana pihak ketiga. 	<p>Triwulan III 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan KYD yang sehat diupayakan dengan kompetisi GPX69 seri II. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja AO dilakukan secara rutin setiap bulan pada semua Kantor Cabang dengan tujuan agar hasil kerja AO dapat efektif menunjang pertumbuhan KYD yang sehat. 2. Penyelesaian kredit NPL, PH dan AYDA terus diupayakan secara intensif dan maksimal melalui serangkaian meeting monitoring penyelesaian kredit bermasalah setiap bulan per kantor cabang agar pembahasan dapat lebih optimal. Tingkat NPL triwulan III masih belum sesuai anggaran, namun kebijakan penyelesaian kredit bermasalah dengan menghapus denda dan sebagian bunga tetap dilanjutkan karena terbukti cukup efektif. Penyelesaian PH akan diupayakan lebih maksimal untuk meningkatkan laba perusahaan yang masih di bawah target pencapaian. 3. Pencapaian target Tabungan Tamasha Kudus VII akan diupayakan untuk meningkatkan dana pihak ke tiga, khususnya tabungan, yang pada akhirnya akan meningkatkan aset BPR WM. Dalam rangka peningkatan DPK, akan ada promo bunga spesial akhir tahun untuk deposito paling sedikit Rp500 juta, jangka waktu 3 bulan, suku bunga sesuai LPS, dibundling dengan simpanan tabungan sebesar 10% dari nilai deposito yang diblokir selama jangka waktu deposito tersebut.

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
	Rekomendasi Dewan Komisaris	Tindak Lanjut Direksi
	<p>Triwulan IV 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan KYD yang sehat perlu menjadi fokus perhatian Direksi, termasuk usaha meningkatkan kinerja AO agar lebih signifikan menunjang pertumbuhan KYD yang sehat. 2. Penyelesaian kredit NPL, hapus buku dan AYDA juga harus menjadi fokus perhatian bagi Direksi, perlu langkah percepatan penyelesaian kredit bermasalah. Penyelesaian kredit hapus buku dan AYDA perlu dilakukan untuk meningkatkan laba usaha. 3. Kredit yang sehat diantaranya didukung oleh analisis kredit yang handal. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas analisis kredit juga perlu ditingkatkan. 4. Kantor Kas perlu dilengkapi dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh program CBS, agar diketahui perkembangan kinerja keuangan kantor kas. 5. Rotasi kepala cabang diperlukan dalam rangka penyegaran dan pengendalian intern. Rotasi kepala cabang terakhir dilakukan pada tahun 2016. 6. Pagu kredit untuk sektor ekonomi perlu ditetapkan agar ekspansi kredit pada sektor ekonomi unggulan dapat lebih terencana dengan baik. 	<p>Triwulan IV 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan KYD yang sehat diupayakan dengan kompetisi GP150 untuk kredit dengan angsuran pokok plafon paling sedikit Rp150 juta. Monitoring dan evaluasi kinerja AO dilakukan secara rutin pada semua Kantor Cabang dengan tujuan agar hasil kerja AO dapat efektif menunjang pertumbuhan KYD yang sehat. 2. Penyelesaian kredit NPL, PH dan AYDA terus diupayakan secara intensif dan maksimal melalui serangkaian meeting monitoring penyelesaian kredit bermasalah setiap bulan per kantor cabang agar pembahasan dapat lebih optimal. Penyelesaian PH dan AYDA akan diupayakan lebih maksimal untuk meningkatkan laba perusahaan di tahun 2022. 3. Upaya perbaikan kualitas kredit dengan mengintensifkan pertemuan bulanan antara bidang Bisnis dan Monitoring untuk mendapatkan umpan balik (<i>feed back</i>) terkait kualitas analisis kredit, sekaligus meningkatkan pemahaman bidang Monitoring untuk perbaikan kualitas analisis kredit restrukturisasi. 4. Laporan keuangan Kantor Kas dari CBS akan memberikan informasi yang lebih valid mengenai performa Kantor Kas, agar Kantor Kas tidak lagi sebagai <i>cost center</i> namun dapat berkontribusi terhadap laba kantor keseluruhan. 5. Rotasi kepala cabang akan dipertimbangkan. Beberapa tahun terakhir memang tidak dilakukan rotasi karena pandemi Covid-19 sehingga saat dilaksanakan restrukturisasi kredit para kepala cabang sudah mengenal dan memahami kondisi usaha debitur dengan baik. 6. Pagu sektor ekonomi akan menjadi pertimbangan agar pencapaian kredit yang sehat dapat lebih terencana dengan baik sesuai profil risiko masing-masing sektor ekonomi.

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Djoko Sumarno Jabatan : Komisaris Utama
2	Nama : Yenny Basuki Jabatan : Komisaris
3	Nama : Gianto Darmawan Jabatan : Komisaris Independen
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR WM. 5. Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai operasional BPR WM, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya. 7. Wajib memberitahukan kepada OJK mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. Keadaan/perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 8. Memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris. 9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas secara optimal. 10. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan 11. Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai suatu permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional melalui rapat bersama Dewan Komisaris dengan Direksi.
	<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <p>Triwulan I 2021</p> <p>Berdasarkan pencapaian kinerja Triwulan I tahun 2021, Dewan Komisaris merekomendasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu kebijakan percepatan penyelesaian kredit bermasalah, kredit hapus buku dan AYDA. 2. Kebijakan restrukturisasi kredit dampak pandemi Covid-19 agar memerhatikan kriteria dan

penilaian kelayakan restrukturisasi.

3. Perlu upaya meningkatkan KYD yang sehat untuk menunjang pertumbuhan bisnis.
4. Perlu inovasi program dalam rangka menjaga kestabilan pertumbuhan kredit.

Triwulan II 2021

1. Peningkatan KYD yang sehat agar menjadi salah satu fokus perhatian Direksi. Perlu pendekatan melalui cara-cara baru yang lebih inovatif dan kreatif termasuk usaha meningkatkan kinerja AO agar lebih signifikan dalam menunjang pertumbuhan KYD yang sehat.
2. Penyelesaian kredit NPL, hapus buku dan AYDA juga agar menjadi fokus perhatian bagi Direksi, perlu langkah kongkrit dalam upaya percepatan penyelesaian kredit bermasalah.
3. Dalam rangka meningkatkan aset dan penyediaan dana berbunga murah, perlu meningkatkan komposisi Tabungan terhadap total penghimpunan dana pihak ketiga.

Triwulan III 2021

1. Perlu usaha meningkatkan pertumbuhan kredit yang sehat, termasuk monitoring dan evaluasi kinerja AO tentang peningkatan konsistensi hasil kerja.
2. Perlu kebijakan percepatan penyelesaian kredit bermasalah, hapus buku dan AYDA.
3. Perlu strategi dan kebijakan untuk memupuk aset menjelang akhir tahun, dengan mengembangkan penghimpunan dana pihak ketiga.

Triwulan IV 2021

1. Meningkatkan KYD yang sehat perlu menjadi fokus perhatian Direksi, termasuk usaha meningkatkan kinerja AO agar lebih signifikan menunjang pertumbuhan KYD yang sehat.
2. Penyelesaian kredit NPL, hapus buku dan AYDA juga harus menjadi fokus perhatian bagi Direksi, perlu langkah percepatan penyelesaian kredit bermasalah. Penyelesaian kredit hapus buku dan AYDA perlu dilakukan untuk meningkatkan laba usaha.
3. Kredit yang sehat diantaranya didukung oleh analisis kredit yang handal. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas analisis kredit juga perlu ditingkatkan.
4. Kantor Kas perlu dilengkapi dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh program CBS, agar diketahui perkembangan kinerja keuangan kantor kas.
5. Rotasi kepala cabang diperlukan dalam rangka penyegaran dan pengendalian intern. Rotasi kepala cabang terakhir dilakukan pada tahun 2016.
6. Pagu kredit untuk sektor ekonomi perlu ditetapkan agar ekspansi kredit pada sektor ekonomi unggulan dapat lebih terencana dengan baik.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diantaranya mengatur bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, serta dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Mengingat modal inti BPR WM belum mencapai Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) maka sesuai POJK Tata Kelola tersebut, BPR WM belum wajib membentuk Komite-Komite sebagaimana dimaksud.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR WM

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Kepemilikan
1	Kerry Thamrim	3.524.000.000	5.03%
2	Hendrardi	-	-
3	Kasmiati	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank	Nama Perusahaan	Kepemilikan
1	Kerry Thamrim	600787 - -	1. PT BPR Mandiri Artha Abadi 2. PT Multi Karya Mitra Sentosa 3. CV Mitra Karya Abadi	10% 10% 12,5%
2	Hendrardi	-	-	-
3	Kasmiati	-	-	-

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR WM

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR WM

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Kerry Thamrim	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Hendrardi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Kasmiati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR WM

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kerry Thamrim	Tidak Ada	Tidak Ada	Tanudjan Sugiarto - mertua, Hengky Tanto Sugiarto – saudara kandung istri.

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
2	Hendrardi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Kasmiati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR WM

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Kepemilikan
1	Djoko Sumarno	-	-
2	Yenny Basuki	7.492.000.000	10.70%
3	Gianto Darmawan	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank	Nama Perusahaan Lain	Kepemilikan
1	Djoko Sumarno	-	-	-
2	Yenny Basuki	-	-	-
3	Gianto Darmawan	-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR WM

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR WM

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Dewan Komisaris	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djoko Sumarno	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yenny Basuki	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Gianto Darmawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR WM

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Dewan Komisaris	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djoko Sumarno	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yenny Basuki	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Gianto Darmawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	491.712.000	3	191.880.000
2	Tunjangan	3	1.076.294.326	3	347.929.174
3	Tantiem	3	0	3	0
4	Kompensasi berbasis saham	3	0	3	0
5	Remunerasi lainnya	3	0	3	0
Total			1.568.006.332		539.809.174

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis fasilitas lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil dinas, 1 (satu) unit setiap orang	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	Asuransi kesehatan dan BPJS	Asuransi kesehatan dan BPJS
4	Fasilitas Lainnya a. Komunikasi b. Natura	Kuota pulsa dan data Pakaian seragam	Tidak Ada Pakaian seragam

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	: 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	3	: 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (a) dan gaji Dewan Komisaris terendah (b)	3	: 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (b)	3	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	6	: 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	26 April 2021	3 (tiga) orang	1. Pengawasan pencapaian target Rencana Bisnis 2. Bahasan isu strategis dan kebijakan 3. Evaluasi kinerja keuangan 4. Rekomendasi

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
2	26 Juli 2021	3 (tiga) orang	1. Pengawasan pencapaian target Rencana Bisnis 2. Bahasan isu strategis dan kebijakan 3. Evaluasi kinerja keuangan 4. Rekomendasi
3	18 Oktober 2021	3 (tiga) orang	1. Pengawasan pencapaian target Rencana Bisnis 2. Bahasan isu strategis dan kebijakan 3. Evaluasi kinerja keuangan 4. Rekomendasi
4	15 Desember 2021	6 (enam) orang	Rapat Bersama Direksi membahas Rencana Bisnis BPR WM Tahun 2022.
5	10 Januari 2022	3 (tiga) orang	1. Pengawasan pencapaian target Rencana Bisnis 2. Bahasan isu strategis dan kebijakan 3. Evaluasi kinerja keuangan 4. Rekomendasi

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Djoko Sumarno	5	0	100%
2	Yenny Basuki	5	0	100%
3	Gianto Darmawan	5	0	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan Internal	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	1
Telah Diselesaikan	█	0	█	0	█	0	█	1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	█	0	█	0	█	0	█	0

Jumlah penyimpangan internal selama tahun 2021 terdapat 1 (satu) kasus, yaitu internal fraud yang dilakukan oleh seorang Teller (status pegawai tidak tetap), jumlah kerugian tidak signifikan dan langsung dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	39	-
Dalam Proses Penyelesaian	1	-
Total	40	-

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR WM selama tahun 2021 sejumlah 40 (empat puluh) perkara, semuanya perkara perdata. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perkara atau 97,5% telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap) dan hanya 1 (satu) perkara yang masih dalam proses penyelesaian.

Klasifikasi permasalahan hukum perdata berdasarkan pokok perkara:

- a. Perkara Wanprestasi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perkara; dan
- b. Perbuatan Melawan Hukum sebanyak 1 (satu) perkara.

Dari jumlah permasalahan hukum tersebut posisi BPR WM sebagai:

- a. Pihak penggugat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perkara; dan
- b. Pihak tergugat sebanyak 1 (satu) perkara.

Posisi BPR WM sebagai penggugat dalam Gugatan Sederhana untuk perkara-perkara wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rp)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
Nihil									

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum oleh OJK pada tahun 2021, bahwa tidak ada hasil temuan audit mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2021 tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dengan nominal paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	19 Juli 2021	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Al-Ikhlas Ngaliyan	3.700.000
2	19 Juli 2021	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Kepatih Surakarta	2.700.000
3	19 Juli 2021	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Al Hidayah Weleri	3.450.000

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
4	20 Juli 2021	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Al-Hikmah Mranggen	3.800.000
5	21 Juli 2021	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Sidowayah Klaten	3.000.000
6	21 Juli 2021	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Khoirul Huda Tegal	3.725.000
7	21 Juli 2021	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Sholiqin Sragen	2.500.000
8	21 Juli 2021	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Panjunan Kudus	3.500.000
9	06 Des 2021	Sosial	Santunan anak yatim	PA Darul Hadlonah Semarang	3.500.000
10	06 Des 2021	Sosial	Santuanan anak yatim	Noor Mudrikah Weleri	1.500.000
11	15 Des 2021	Sosial	Santunan anak yatim	PA Welas Asih Tegal	1.000.000

BAB III

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian yang terdiri atas:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
10. Rencana Bisnis; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil akhir penilaian sendiri penerapan Tata Kelola berupa peringkat komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

A. Ringkasan Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola

Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri atas 11 (sebelas) faktor sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola. Berikut merupakan ringkasan kertas kerja penilaian sendiri penerapan Tata Kelola Tahun 2020:

No.	Kriteria/Indikator	\sum Nilai a	\sum Pertanyaan b	Bobot c	Hasil a : b x c
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	6	6	50%	0,5
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	11	8	40%	0,55
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	9	5	10%	0,18
	Penjumlahan S + P + H				1,23
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 20%				0,25
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	9	9	50%	0,5

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

No.	Kriteria/Indikator	Σ Nilai a	Σ Pertanyaan b	Bobot c	Hasil a : b x c
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	14	8	40%	0,7
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	1	10%	0,3
	Penjumlahan S + P + H				1,5
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 15%				0,23
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	0	1	50%	0
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	0	3	40%	0
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	0	1	10%	0
	Penjumlahan S + P + H				0
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 0%				0
4	Penanganan Benturan Kepentingan				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1,0
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	2	1	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	1	10%	0,3
	Penjumlahan S + P + H				2,1
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 10%				0,21
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	8	5	50%	0,8
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	10	5	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	6	3	10%	0,2
	Penjumlahan S + P + H				1,8
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 10%				0,18
6	Penerapan Fungsi Audit Intern				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	8	5	50%	0,8
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	8	4	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	7	4	10%	0,18
	Penjumlahan S + P + H				1,78
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 10%				0,18
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	4	2	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	4	2	10%	0,2
	Penjumlahan S + P + H				2
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 2,5%				0,05
8	Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Intern				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	7	3	50%	1,17
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	21	7	40%	1,2
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	4	2	10%	0,2
	Penjumlahan S + P + H				2,57
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 10%				0,26
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	5	2	40%	1
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	2	10%	0,15
	Penjumlahan S + P + H				2,15
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 7,5%				0,16
10	Rencana Bisnis				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	6	3	50%	1
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	4	2	40%	0,8
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	1	1	10%	0,1
	Penjumlahan S + P + H				1,9
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 7,5%				0,14
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

No.	Kriteria/Indikator	\sum Nilai a	\sum Pertanyaan b	Bobot c	Hasil a : b x c
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	9	4	40%	0,9
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	2	10%	0,15
	Penjumlahan S + P + H				2,05
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 7,5%				0,15

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Nilai Faktor	0.25	0.23	-	0.21	0.18	0.18	0.05	0.26	0.16	0.14	0.15	1.80
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Faktor 1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kelemahan: Direksi telah mengomunikasikan kebijakan strategis kepegawaian, namun cakupannya belum menyeluruh.

Kekuatan: Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Faktor 2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kelemahan: Hasil rapat Dekom telah dituangkan dalam risalah rapat, namun belum mencantumkan adanya *dissenting opinions*.

Kekuatan: Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada BPR lain, BPRS dan/atau Bank Umum.

Faktor 3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

BPR WM mempunyai modal inti kurang dari Rp80 miliar, belum wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Faktor 4 Penanganan Benturan Kepentingan

Kelemahan: Transaksi yang berpotensi terdapat benturan kepentingan belum secara tertib dilengkapi dengan dokumen pendukung pengungkapan atas benturan kepentingan.

Kekuatan: BPR WM telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan.

Faktor 5 Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kelemahan: Pemantauan dan reviu terhadap semua ketentuan intern belum dapat dilakukan secara tertib dan berkala.

Kekuatan: Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 6 Penerapan Fungsi Audit Intern

Kelemahan: Memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM secara umum, namun belum spesifik mengenai fungsi audit intern.

Kekuatan: Satuan Kerja Audit Intern independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kelemahan: Auditor Ekstern kurang memberi informasi mengenai kelemahan-kelemahan terkait pengendalian intern dan saran-saran perbaikannya.

Kekuatan: Auditor Ekstern (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah memenuhi legalitas sesuai ketentuan OJK.

Faktor 8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan: Implementasi manajemen risiko dalam berbagai aktivitas unit kerja masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Kekuatan: Satuan Kerja Manajemen Risiko independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 9 Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kelemahan: Menghindari pemberian fasilitas kredit yang hampir menembus ketentuan BMPK.

Laporan Penerapan Tata Kelola 2021

Kekuatan: Bank tidak pernah melanggar dan/atau melampaui ketentuan BMPK.

Faktor 10 Rencana Bisnis BPR

Kelemahan: Pada Rencana Bisnis 2022 tidak terdapat rencana penambahan modal dari pemegang saham untuk memperkuat struktur permodalan.

Kekuatan: Rencana Bisnis 2022 telah dilaporkan sesuai ketentuan OJK.

Faktor 11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kelemahan: Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan *Core Banking System* sehingga masih perlu pengolahan data.

Kekuatan: Pelaporan keuangan dan non keuangan senantiasa tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM Tahun 2021 ini kami sampaikan dengan sebenarnya. Laporan Penerapan Tata Kelola ini dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.



DJOKO SUMARNO
Komisaris Utama

Semarang, 22 April 2022
BANK PERKREDITAN RAKYAT
WELERI MAKMUR,



KERRY THAMRIM
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Weleri Makmur

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495370-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600567-25042022164252

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

skkmr.bprwm@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-25 16:42:52

26/4 22
BPR



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.